

**Analisis Penerapan Sistem Informasi Dan *Good Governance* Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai
(Studi pada *e-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Kediri)**

Ratih Pawesti, Eka Askafi

Magister Manajemen, Universitas Islam Kediri

Email: pawestiratih20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-procurement*, *good governance* dan efisiensi kerja pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Jumlah sampel sebanyak 70 responden, menyebar angket/kuesioner pada 5 satuan kerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah menerapkan pengadaan barang jasa secara elektronik. Analisa data menggunakan perhitungan model regresi linier berganda dengan *Statistical Package for the Social Sciences* (IBM SPSS Statistics 26). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* dan *good governance* berpengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai baik secara simultan maupun parsial, dan *good governance* berpengaruh dominan terhadap efisiensi kerja pegawai.

Kata kunci: *e-procurement*, *good governance*, efisiensi kerja pegawai

Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut Stephen P. Robbins (2012) organisasi merupakan kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Untuk menciptakan tata kelola yang *smart* sebuah lembaga/organisasi menerapkan teknologi digital dan internet sebagai medianya. Penggunaan internet dan teknologi digital menciptakan kemitraan publik yang progresif, memperkuat lembaga-lembaga atau organisasi bisnis dan mengintegrasikan semua bagian masyarakat. Pemerintah merupakan salah satu organisasi formal yang dalam melaksanakan tupoksinya menciptakan kemitraan *public* dengan berbagai organisasi di berbagai sektor bisnis

Kinerja birokrasi pemerintahan dewasa ini menuntut adanya pemahaman penting terhadap peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam hal proses penyelenggaraan tata kelolanya, salah satunya pada proses belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh institusi pemerintah saat ini. Perkembangan zaman yang menuntut

kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan harus serta merta diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi dan aplikasinya

Menurut Kiswara (2011) mendefinisikan pengadaan barang/ jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai usaha untuk memperoleh barang, jasa dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat ini telah terbit yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Perpres terdahulu yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dikemukakan dalam Perpres No 16 Tahun 2018 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa ini menggunakan system yang disebut dengan *Elektronik Procurement*, telah diberlakukan untuk Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Instansi sejak tahun 2010.

E-procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi

dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012)

Sistem *E-procurement* dapat menjadi alat untuk mencapai tatakelola pemerintah yang baik karena dapat memberikan kesempatan untuk semua pihak turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa secara virtual, mengikuti dan mengawasi tahapan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement* adalah kurangnya dukungan finansial, dimana beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurang dukungan dari tingkat atas manajemen, belum meratanya keterampilan dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan sistem keamanan atas *e-procurement* itu sendiri. Penyebab hambatan sistem *e-procurement* dapat ditelaah lebih lanjut dari beberapa factor antara lain kebijakan, sumber daya manusia dan perangkat keras dan infrastruktur jaringan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Willem (2012:80) “Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI)”

Dengan adanya sistem *e-procurement* yang berkualitas, kinerja institusi pemerintahan yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan.

Hal ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang konvensional. Pengadaan konvensional membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, terbatasnya

akses pasar, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat sehingga berakibat terhadap kualitas proses pengadaan, terjadi eksklusif terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu.

Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*)

Secara konseptual pengertian baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yaitu: 1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, dan 2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. (Damayanti, Astari dkk)

Pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) telah dilakukan salah satunya melalui Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, hal ini diterapkan untuk meningkatkan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggung jawab

dan bersih sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kediri, Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang ada dinilai masih perlu evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari fenomena pegawai yang ada diketahui belum semua personil memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat terhadap tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam memproses pengadaan barang dan jasa, dan belum efisien terhadap waktu. Selain itu adanya faktor lain diduga juga dapat mempengaruhi kurangnya maksimalnya kinerja dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu kepemimpinan, kompensasi, koordinasi, budaya kerja, disiplin kerja, pendidikan formal, fasilitas kerja, kualitas sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, kompetensi jabatan, budaya organisasi, pengawasan melekat dan lain-lain.

Efisiensi kerja pegawai Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Kediri juga dapat dipengaruhi oleh faktor *good governance*. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (Sedarmayanti, 2007: 2).

Sementara itu, *World Bank* (dalam Damayanti, Astri dkk) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan hasil observasi pada Pemerintah Kabupaten Kediri, *good governance* belum terimplementasi maksimal. Selain itu masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang berakibat pada kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan masih terdapat praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menentukan judul: **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFISIENSI KERJA (Studi Pada E-Procurement di Pemerintah Kabupaten Kediri)”**.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian

Berdasarkan tingkat kealamiahannya penelitian ini menggunakan *metode penelitian survey*. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam

eksperimen. (Sugiyono, 2013). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *metode deskriptif* dan *verifikatif*. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:59) adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”

Penggunaan metode deskriptif digunakan untuk dapat mengetahui nilai *e-Procurement*, *Good Governance*, dan Efisiensi kerja karyawan.

Metode penelitian verifikatif menurut Iqbal Hasan (2008: 11) adalah sebagai berikut :

“Menguji kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik”.

Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu : (1) Untuk menjelaskan atau menganalisis pengaruh *e-Procurement* terhadap Efisiensi kerja pegawai; (2) Untuk menjelaskan atau menganalisis pengaruh *Good Governance* terhadap Efisiensi kerja pegawai; (3) Untuk menjelaskan atau menganalisis pengaruh *e-Procurement* dan *Good Governance* terhadap Efisiensi kerja pegawai

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa satuan kerja Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Sedangkan peneliti memiliki beberapa pertimbangan antara lain:

1. Peneliti merupakan salah satu pegawai Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, hingga diharapkan lebih mengetahui secara empiris keadaan intern mengenai pengadaan barang dan jasa tersebut.
2. Faktor efisiensi dan efektivitas sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam waktu singkat dan kebutuhan biaya yang tidak terlalu tinggi.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut sifatnya merupakan populasi yang *homogen*. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yaitu pegawai di yang menangani Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan langsung menjadi sampel penelitian dengan menggunakan *Metode Sensus/sampling total*. Teknik pengambilan sample dimana seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sample semua sebagai subyek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi.

Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil, melainkan hanya sebagian dari populasi. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pegawai PNS di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut maka seluruh populasi yang ada sejumlah 80 akan dijadikan sampel penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Data merupakan fakta yang sangat penting dalam pembuatan suatu penelitian, dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menunjang terlaksananya penyusunan tesis

ini maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti dalam menerapkan suatu metode yang digunakannya.

Kuesioner

Data yang diperoleh dari responden berdasarkan kuesioner yang diberikan yang merupakan seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan kepada responden. Tujuan utama dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey, memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin.

Dokumenter

Dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mencatat dari dokumen-dokumen yang ada di Obyek Penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner (Ghozali, 2018). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Dengan menggunakan instrumen validitasnya, otomatis hasil penelitian menjadi valid. Dalam pengujian ini digunakan asumsi bahwa nilai korelasi metode Pearson product moment tinggi maka dikatakan valid, selain itu jika signifikan yang ditunjukkan kurang dari nilai $\alpha = 0,05$ juga dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Instrumen dikatakan reliabel apabila dipergunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas digunakan juga untuk menguji konsistensi hasil pengukuran kuesioner yang erat hubungannya dengan masalah kepercayaan. Suatu taraf tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan bila tes tersebut memberikan hasil yang tepat.

Pada hasil uji reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha diketahui bahwa variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.6 (Nunnally, 2010).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis data, ada beberapa syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memenuhi prasyarat dari Uji Regresi Linier Berganda, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation factor (VIF)*. Apabila nilai $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya multikolinieritas, dan sebaliknya bila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Kemudian jika nilai TOL (tolerance value) sama dengan 1, maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi (Gujarati, 2003)

Uji Heterokedastisitas

Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*, dimana sumbu Y adalah nilai Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah *residual*. Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang bergelombang, meleber kemudian menyempit, dan lainnya, maka terjadi indikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Pengujian Ketepatan Model

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh bersama dari variabel bebas *e-procurement* dan *good governance* terhadap variabel terikat yaitu Efisiensi Kerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri. Uji signifikansi F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada Tabel Anova. Untuk mengetahui variabel-variabel secara independen simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan *p-value* pada kolom *sig.* dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima (Nugroho, 2005)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien korelasi mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas yang terdiri variabel *e-procurement* dan *good governance*, dan dengan variabel terikat Efisiensi Kerja Pegawai.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 46).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Analisa ini berupa explanasi hubungan antara variabel terikat ketika variabel *predictor* diketahui atau berubah

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas/independen yang terdiri dari variabel *e-procurement* dan *good governance* terhadap variabel terikat/dependen efisiensi kerja pegawai. Dari Uji t akan diketahui prediksi nilai perubahan variabel terikat ketika nilai variabel bebas diketahui atau berubah.

Demikian juga dari nilai signifikansi akan diketahui berapa peluang salah dari prediksi nilai tersebut. Semakin kecil nilai signifikansi maka prediksi tingkat kesalahannya lebih kecil. Dimensi variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$

Pada pengujian ini juga dapat menunjukkan pengaruh variabel bebas mana yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel terikat, sehingga dapat ditentukan urutan dominasinya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan wilayah yang memiliki potensi strategis di Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan prioritas pembangunan daerah berupa program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan hasil analisis terhadap visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri
Visi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu :

”Terwujudnya masyarakat kabupaten kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani “

https://kedirikab.go.id/program_pembangunan

Misi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis religius
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan,
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah,
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal,
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam, dan mitigasi bencana,
8. Pengembangan seni budaya, olahraga dan kreativitas pemuda,
9. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana berdasarkan Perda No:08 s/d 40 Tahun 2008 terdigambarkan dalam bagan dibawah ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Kediri terbagi menjadi 16(enam belas) Dinas, 14 (empat belas) Lembaga Teknis dan 4 (empat) Lembaga Non Struktural Variabel Efisiensi Kerja Pegawai yang memiliki nilai rata-rata jawaban tertinggi terletak pada indikator 7 yaitu “Minutes Information” dan yang memiliki nilai rata-rata jawaban terendah terletak pada indicator 4 yaitu “Machine”.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis data, ada beberapa syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memenuhi prasyarat dari Uji Regresi Linier Berganda, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas,

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka

data berdistribusi normal, namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Diagram 4.1

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2021

Sebagaimana terlihat pada histogram, nilai data dikelompokkan dalam maka data tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal, yakni data tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan memiliki titik puncak.

Berdasarkan tampilan output chart di atas dapat terlihat grafik histogram maupun grafik plot, dimana terlihat pada grafik histogram tersebut memberikan pola distribusi yang miring ke kanan, hal tersebut menunjukkan data berdistribusi normal. Selanjutnya pada gambar P-plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Multikolinieritas dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation factor (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya multikolinieritas, dan sebaliknya bila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Kemudian jika nilai TOL (tolerance value) sama dengan 1, maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi (Gujarati, 2003). Hasil pengujian Multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Table 4.11

Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel Bebas	Collinearity Tolerance (TOL)	VIF	Keterangan
1	E-procurement (x1)	0,239	4,176	Non-Multikolinieritas
2	Good Governance(x2)	0,239	4,176	Non-Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai nilai VIF dibawah atau < 10 dan tolerance value diatas atau > 0,1. Sehingga dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedasititas

Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot, dimana sumbu Y adalah nilai Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang bergelombang, meleber kemudian menyempit, dan lainnya, maka terjadi indikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebagaimana tergambar pada grafik scatter plot dibawah ini titi-titik data menyebar secara acak serta tersebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Diagram 4.2

Hasil Uji Heteroskedasititas

Sumber: Data diolah, 2021

4.6 Analisa Data / Pengujian Ketepatan Model

4.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel anova. Untuk mengetahui variabel-variabel secara independen simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima (Nugroho, 2005)

Table 4.12

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVAa			
Model	Sum	Mean	
of Squares	Df		
Square	F	Sig	
1	Regression	2776,639	2
		1388,320	40,665
	Residual	2287,432	67
		34,141	
	Total	5064,071	69

a. Dependent Variable : Efisiensi

Kerja Pegawai

b. Predictor: (Constant), Good Governance, E-Procurement

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil output tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa hasil signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0,05$) dan didapatkan nilai F-hitung sebesar 40,665. Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas e-procurement (X1) dan good governance (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi kerja karyawan (Y)

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 46). Dalam penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R2.

Table 4.13

Hasil Uji RSquare (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	
Square	Std.Error of the Estimate			
1	.740a	.548	.535	5.84301

a. Predictor: (Constant), Good Governance, E-Procurement

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil uji R2, diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,535 atau 53,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kerja pegawai (y) dapat dijelaskan sebesar 53,3% oleh variabel independen yaitu e-procurement dan good governance Sedangkan 46,7% variasi efisiensi kerja pegawai dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini dan tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics 26) . Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut:

Table 4.14
Hasil Uji Statistik t

Mdl	Variabel	Coefficientsa	
		Unstandardized	Standardized
B			Beta
Std. Error			
	t	Sig.	
1	(Constan)	7.146	9.402
		.760	.450
	e-procurement	.302	.191
		.265	1.578
	Good Governance	.599	
		.202	.498
		2.969	.004

a. Dependent Variable : Efisiensi Kerja Pegawai

Sumber: Data diolah, 2021
Menurut Sugiyono (2012:277) analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda dilakukan jika variabel bebas berjumlah dua atau lebih. Metode regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh e-procurement dan good governance terhadap efisiensi kerja pegawai. Adapun model persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
Sumber: Sugiyono (2012 :192)

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh persamaan sebagai berikut

$$Y = 7,146 + 0,302 X1 + 0,599 X2 + e$$

Interpretasi:

a = 7,146; artinya jika e-procurement 0 dan good governance 0 (tidak ada e-procurement dan good governance), maka efisiensi kerja pegawai adalah 7,146.

b = 0,302; artinya jika e-procurement meningkat sebesar 1 tingkatan dan good governance tetap, maka efisiensi kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,302 tingkatan.

c = 0,599; artinya jika good governance meningkat sebesar 1 tingkatan dan e-procurement tetap, maka efisiensi kerja pegawai akan meningkat sebesar 0,599 tingkatan

4.6.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel Coefficients a.

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.14 menunjukkan bahwa Koefisien b1 standart yang diperoleh dalam analisis ini e-procurement sebesar 0,265 (positif) dan good governance sebesar 0,498 (positif) yang memberikan pengertian bahwa :
- Setiap perubahan variabel bebas e-procurement, 26,5% berpengaruh nyata dan positif terhadap perubahan variabel tak bebas Efisiensi Kerja Pegawai dengan arah yang sama,

- Untuk variabel bebas good governance, setiap unit perubahan variabel tersebut, sebesar 49,8% berpengaruh nyata dan positif terhadap perubahan variabel tak bebas Efisiensi Kerja Pegawai dengan arah yang sama.

Artinya secara parsial jika variabel-variabel bebas tersebut (e-procurement dan good governance) terdapat peningkatan atau naik 1 unit maka efisiensi kerja pegawai juga akan naik sebesar koefisien regresinya begitu pula sebaliknya.

Kemudian dari koefisien-koefisien Uji t diperoleh signifikansi berikut :

- Untuk konstanta b_0 sebesar 0,450 ; maka ketepatan prediksi variable Efisiensi Kerja Pegawai dari konstanta mempunyai peluang salah sebesar 45%
- Signifikansi uji untuk b_1 e-procurement sebesar 0,119 ; maka ketepatan prediksi variable Efisiensi Kerja Pegawai dari e-procurement mempunyai peluang salah sebesar 11,9%
- Signifikansi uji untuk b_2 good governance sebesar 0,004 ; maka ketepatan prediksi variable Efisiensi Kerja Pegawai dari good governance mempunyai peluang salah sebesar 0,4%

Jika di artikan :

E-procurement berpengaruh positif terhadap efisiensi kerja pegawai tetapi mempunyai resiko salah yang besar 11,9% (signifikan pada level 15%) sementara untuk good governance berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi kerja pegawai dengan peluang salah sebesar 0,4% (signifikan pada level 1%). Maka berdasarkan besarnya koefisien korelasi dan signifikansi tersebut di dalam Peningkatan Efisiensi Kerja Pegawai berdasarkan prioritasnya secara berturut turut yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah (1) good governance (2) e-procurement.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-procurement dan good governance terhadap Efisiensi Kerja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun pembahasan masing- masing variabel adalah sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh e-procurement terhadap Efisiensi Kerja Pegawai

Berdasarkan hasil pengujian variable X_1 e-procurement berpengaruh positif sebesar 26,5% terhadap efisiensi kerja pegawai dan mempunyai resiko salah sebesar 11,9%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titik Aryati, Leviadi Pangaribuan (2019). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Procurement berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Leny Diah Astari, Muallifatul Dalatululum, Nia Kurniasih, Novita Devi Indahsari Yuni

Kurniasih (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Hasil penelitiannya menganalisa bahwa penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya telah berjalan secara efisien. dan mampu memenuhi kriteria efisiensi, salah satunya adalah efisiensi dalam metode pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Di dalam tesis ini hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk variable bebas (X_1) e-procurement, berpengaruh terhadap variable independen (Y) efisiensi kerja pegawai sebesar 26,5%. Memiliki arti bahwa, setiap perubahan variable bebas e-procurement berpengaruh nyata dan positif terhadap perubahan variable tak bebas Efisiensi Kerja Pegawai dengan arah yang sama sebesar 26,5%.

Hasil signifikansi Uji Statistic t untuk b_1 e-procurement = 0,119. Memiliki arti bahwa ketepatan prediksi variable Efisiensi Kerja Pegawai dari e-procurement mempunyai peluang salah sebesar 11,9%.

Peluang salah yang terjadi dalam penerapan e-procurement di Pemkab Kediri kemungkinan dapat dipengaruhi oleh factor-faktor antara lain :

1. Masing-masing dari personil/pelaku PBJ (PPK,PPtk,PP, Staf Admin dan Operator) belum berperan sebagaimana mestinya sesuai tupoksi, dalam pelaksanaannya sering adanya tumpang tindih / overlapping pada sebagian peran.
2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi atau keahlian SDM dalam mengoperasikan aplikasi e-procurement yang ada.
3. Lemahnya persepsi bahwa aplikasi tersebut membantu proses pekerjaan, bukan procedural (bukan hanya sesuatu yang wajib dilewati)
4. Belum adanya pengawasan dan punishment yang tegas pada setiap personil/pelaku PBJ (PPK,PPtk,PP, Staf Admin dan Operator), apakah personil tersebut telah benar-benar mampu dan telah melaksanakan tugas dengan baik. Beberapa faktor tersebut diharapkan dapat menjadi input positif serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara

pengadaan barang dan jasa elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

Dalam penelitian ini, Statistik Deskriptif dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner menghasilkan nilai rata-rata tertinggi dan nilai rata-rata terendah dari beberapa indikator-indikator yang dihasilkan oleh masing-masing variable.

Nilai distribusi jawaban responden tertinggi pada variabel E-procurement terletak pada indikator 4 yaitu “Kemudahan Audit”. Hal ini mempunyai makna bahwa berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Pemkab Kediri implementasi e-procurement sangat mendukung pelaksanaan proses pengawasan/audit, baik audit keuangan ataupun kinerja, karena dengan memakai aplikasi ini informasi dapat real time, dapat diikuti kronologis riwayat nya karena terekam dalam system secara terperinci serta dapat terjamin kemanannya

Nilai distribusi jawaban responden yang memiliki rata-rata jawaban terendah terletak pada indicator 3 yaitu “Efisiensi Proses” dan terletak pada item 8 yaitu pada pernyataan “Proses e-Procurement membuat intensitas pertemuan antara panitia dan peserta berkurang. Hal ini berarti bahwa tujuan dari e-procurement untuk mengurangi intensitas pertemuan antara panitia dan peserta masih belum tercapai maksimal, karena pada kenyataannya pertemuan tersebut masih intens terjadi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya penguasaan teknis dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut, terutama di kalangan penyedia jasa.

4.7.2 Pengaruh Good Governance

terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Berdasarkan hasil pengujian, variable good governance berpengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar 49,8% dan mempunyai resiko salah sebesar 0,4% Hal ini sejalan dengan penelitian dari Lia Heriawati (2018) dalam penelitian tesisnya yang berjudul Pengaruh Penerapan

Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Menurut Lia Herawati (2018) Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 10,06%.

Secara umum, good governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Maka dapat diartikan bahwa good governance sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007:2).

Di dalam tesis ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance berpengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar 49,8%. Memiliki arti bahwa, setiap perubahan variable bebas (X2) good governance berpengaruh nyata dan positif terhadap perubahan variable independen (Y) Efisiensi Kerja Pegawai dengan arah yang sama sebesar 49,8%.

Hasil signifikansi Uji Statistic t untuk b2 good governance = 0,004. Memiliki arti bahwa ketepatan prediksi variable Efisiensi Kerja Pegawai dari good governance mempunyai peluang salah sebesar 0,4%. Dalam penelitian ini hasil Statistik Deskriptif dari jawaban responden diketahui bahwa rata-rata tertinggi sebesar 5,35 terdapat pada indikator 5 yaitu Transparansi dan terletak pada pernyataan item 12 yaitu “Keputusan/kebijakan mudah diakses dan diterima oleh semua pihak”. Hal ini berarti bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri implementasi Good Governance telah terlaksana baik sesuai dengan azas transparansi. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan

dimonitori oleh masyarakat (Mardiasmo, 2016)

Berdasarkan hasil Statistik berikutnya yaitu nilai distribusi jawaban terendah. Nilai distribusi jawaban terendah terletak pada indikator 3 yaitu Persamaan, pada item 6 yang berbunyi “Tidak adanya standart ganda dalam pelaksanaan keputusan/kebijakan”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola pemerintahannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri masih belum maksimal dalam menerapkan azas Persamaan dan masih adanya standart ganda dalam pelaksanaan keputusan/kebijakannya. Makna dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan azas good governance yaitu keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas akan menghasilkan suatu produk keputusan/kebijakan yang baik pula, terhindar dari diskriminasi, standart ganda dan penyalahgunaan wewenang. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik good governance akan menciptakan suasana kerja yang baik, kondusif dan dinamis sehingga akan berpengaruh positif terhadap kenyamanan kerja pegawai. Ketika kenyamanan dalam bekerja telah tercapai maka proses berkegiatan akan berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai output/goals yang telah ditetapkan. Sehingga kualitas hubungan antara governance (pemerintah), private sectors (sektor swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat) akan terwujud dan dapat bersinergi dengan baik.

4.7.3 Pengaruh E-Procurement dan Good Governance terhadap Efisiensi Kerja Pegawai

Berdasarkan hasil pengujian, variabel e-procurement dan good governance secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap efisiensi kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Hasil uji R², diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,535 atau 53,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kerja pegawai (y) dapat dijelaskan sebesar 53,3% oleh variabel independen yaitu e-procurement dan good governance Sedangkan 46,7% variasi efisiensi kerja pegawai dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen penelitian ini dan tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sebagaimana dikemukakan pada subbahasan sebelumnya, hasil Uji Simultan (Uji F) diketahui signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0,05$) dan didapatkan nilai F- hitung sebesar 40,665. Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas e-procurement (X1) dan good governance (X2) berpengaruh terhadap variabel efisiensi kerja karyawan (Y) Makna yang dapat ditelaah dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa kolaborasi secara bersama-sama antara implementasi good governance dan e-procurement yang baik akan membuat tingkat efisiensi kerja pegawai akan membaik pula. Implementasi e-procurement yang baik mendukung pelaksanaan proses pengawasan/audit dan implementasi good governance yang baik akan menghasilkan keputusan/kebijakan mudah diakses dan diterima oleh semua pihak. Kedua hal ini sangat mempengaruhi tingkat efisiensi kerja pegawai yang dilihat dari indicator man, money, material, method, marketing dan minutes information.

4.7.4 Dominasi pengaruh Good Governance terhadap Efisiensi Kerja Pegawai

Diantara kedua variabel tersebut, variable good governance memiliki pengaruh lebih dominan terhadap efisiensi kerja pegawai dibandingkan dengan e-procurement. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji statistic t bahwa untuk variable (X1) e-procurement berpengaruh 26,5% dan (X2) good governance berpengaruh 49,8% terhadap variable (Y) efisiensi kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Angka tersebut menunjukkan prosentase variable good governance lebih besar. Sementara dari hasil signifikansi diperoleh nilai variable e-procurement (X1) sebesar 0,119 dan variable good governance (X2) sebesar 0,04. Semakin kecil nilai signifikansi maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih dominan karena prediksi tingkat kesalahannya lebih kecil.

Maka makna yang dapat disimpulkan bahwa jika tata kelola pemerintahan telah baik maka segala sesuatunya akan mengikuti termasuk pelaksanaan bermacam system informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatannya. Kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mewujudkan keberhasilan sinergitas antara governance (pemerintah), private sectors (sektor swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat). Tentunya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan azas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Besarnya dominasi pengaruh aspek good governance terhadap peningkatan efisiensi kerja pegawai akan berimplikasi pula pada pelaksanaan e-procurement. Sehingga keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) akan berjalan baik pula. Secara berurutan hal yang perlu dibenahi untuk mewujudkan efisiensi kerja pegawai yang tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu perwujudan good governance terlebih dahulu lalu kemudian perbaikan/pembenahan dan penyempurnaan pelaksanaan e-procurement secara menyeluruh. Baik pembenahan dalam hal pemahaman operasionalisasi, penyediaan sarana prasarannya maupun manajemen sumberdaya manusia yang memproses aplikasi tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya dari penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem**

Informasi dan Good Governance terhadap Efisiensi Kerja Pegawai (Studi Pada E-Procurement di Pemerintah Kabupaten Kediri” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *E-procurement* berpengaruh terhadap Efisiensi Kerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Efisiensi Kerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri
3. Penerapan *e-procurement* dan *good governance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap Efisiensi Kerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri
4. Implementasi *good governance* berpengaruh dominan terhadap Efisiensi Kerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri

5.2 Saran

Berikut disampaikan beberapa saran yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Saran Teoritik (bagi Akademisi)
Diharapkan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut berikutnya di bidang yang sama sehingga dapat memperdalam dan mengembangkan hasil dari penelitian ini sehingga dapat ditemukan manfaat yang lebih luas lagi.
2. Saran Empirik (bagi Praktisi)
Diharapkan dengan adanya penelitian ini memunculkan keterbukaan wawasan dari *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat) tentang system informasi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik /*e-procurement* dan tata kelola pemerintahan yang baik /*good governance*.
3. Saran Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri
 - Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang jasa secara elektronik / *e-procurement* hendaknya ditindaklanjuti secara tepat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, adil,

dinamis, sesuai procedure dan tidak menyalah gunakan wewenang sehingga dapat berpengaruh nyata terhadap efisiensi kerja pegawai.

- Perlu ditingkatkannya pengawasan dan *punishment* yang tegas untuk menghindarkan adanya *overlapping* /tumpang tindih peran antar personil (pelaku pengadaan barang dan jasa) Hal tersebut akan dapat memaksimalkan penerapan *e-procurement* dan pegawai dapat bekerja secara efisien
- Perlu ditingkatkannya penambahan tenaga ahli IT, penambahan frekuensi bimbingan teknis dan pelatihan sehingga peningkatan kemampuan/ penguasaan teknis dan kompetensi personil (baik pelaku pengadaan barang / jasa maupun penyedia) semakin baik.
- Terus meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan azas *good governance* yaitu keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sehingga akan menghasilkan suatu produk keputusan/kebijakan yang baik pula, terhindar dari diskriminasi, standart ganda dan penyalahgunaan wewenang.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara *governance* (pemerintah), *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat) akan terwujud serta dapat bersinergi dengan baik terutama dalam bidang kegiatan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andik Yulianto, *Efek Berantai Implementasi LPSE*,
<http://lpse.blogdetik.com/2009/12/11/efekberantai-implementasi-lpse/> didownload pada tanggal 22 Februari 2021.
- Agimo, *Publication of Australian Government of Finance and Deregulation*,
www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary didownload pada tanggal 18 Januari 2021.
- Anonymous,
<http://webcache.googleusercontent.com/> didownload pada tanggal 18 Januari 2021.
- Arsyad, Maharany, dkk. 2016. *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Lpse Kota Kendari*. Kendari.
- Astari, Leny Diah, dkk. 2020. *Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya*. Surabaya.
- Aryati, Titik dan Pangaribuan, Leviadi. 2019. *Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- BPKP, *Modul Auditing*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2015) hal. 18.
- Dedy Cahyadi, *Tinjauan Kritis Atas CA (Certificate/Certification Authority) dalam UU ITE: Perspektif Akademis*, Jurnal Informatika Universitas Mulawarman Vol. 4 No. 1 Februari 2009.
- Hair, Joseph F. Jr. et al. 2010, *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. Pearson. Education Limited. Harlow. England.
- Hemat Dwi Nuryanto, Pentingnya Audit Dan Standardisasi "E-Procurement", *Harian Pikiran Rakyat*, Kamis 5 Maret 2009.
- Heriawati, Lia. 2018. *Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang*. Pandeglang.
- KOMINFO,
<http://www.depkominfo.go.id/produk/certification-authority/> didownload pada tanggal 21 April 2010.

- LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan Perpres 106/2007. Lembaga ini sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik - Bappenas. di download pada tanggal 22 Februari 2021.
- LPSE, <http://lpse.blogdetik.com/sejarah/> didownload pada tanggal 22 Februari 2021.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Rahmawan Satriyo, dkk. 2018. *Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)*. Magetan.
- Nunnally. 2010. *Uji Reliabilitas. Dalam I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (hal. 42)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 23/Per/M.Kominfo/06/2008 *Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan Sistem E-Pengadaan Pemerintah di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika 20 Juni 2008*.
- PLOUGH, E-Procurement White Paper, didownload dari www.ploug.org.pl/interesujace_teksty/eProcurement_White_Paper_Final.pdf pada tanggal 17 Mei 2021
- Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Potensi Pengembangan E-Procurement, E-book di download pada situs www.portal.pengadaannasionalbapenas.go.id tanggal 21 April 2010.
- SCOTTISH, Publikasi E-Procurement, www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf didownload pada tanggal 15 Mei 2021
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- SIEMENS, http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm didownload pada tanggal 11 Januari 2021.
- Susilawati, Ana. 2020. *Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang*. Palembang.
- WIKIPEDIA, <http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement> didownload pada tanggal 11 Januari 2021.